

## **Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal: Studi Empiris pada Desa Ranakolo Selatan Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Pius Sai<sup>1</sup>, Hyronimus Se<sup>2</sup>, Imaculata Fatima<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Magister Manajemen Universitas Flores

piussai280974@gmail.com, odjadaniel03@gmail.com, imaculataf@yahoo.com

### **ABSTRACT.**

*Economic empowerment is based on local potential, but optimal implementation still faces challenges and disparities in various regions. This study aims to analyze the management of Village Funds, the determinants of its success, and formulate optimization strategies for economic empowerment based on local potential in South Ranakolo Village. This study uses a qualitative phenomenological approach with a descriptive type. The study location is South Ranakolo Village, Maurole District, Ende Regency, NTT. The main data sources were obtained through in-depth interviews with village officials, the BPD, and community leaders, participatory observation, and documentation. Data analysis follows the Miles and Huberman model: data compression, data presentation, and drawing/verifying conclusions. The results show that the management of Village Funds in South Ranakolo has been based on the principles of Transparency (publication of the Village Budget), Accountability (through the Village Consultative Assembly (MUSDES), Village Work Plan (RKP), and Village Financial Reporting Agency (LKPPD), Participation (MUSDUS and Village Budget Planning (MUSRENBANGDES), and Budgetary Order and Discipline. Economic empowerment efforts are carried out with the principles. Equality (seed assistance, Village-Owned Enterprises), Participation (skills training), Self-Reliance, and Sustainability (utilization of strategic locations). Key factors influencing success are Transparency, Accountability, Community Participation, Village Apparatus Capacity, and Technology/Digital Literacy. Optimization strategies are implemented through a rigorous participatory planning cycle and strengthening the BPD in oversight. Optimization of Village Fund management in South Ranakolo Village is driven by the synergy between transparent and accountable governance, support for active community participation, and strengthening the capacity of village officials and digital literacy. This has a positive impact on improving the village community's independent and sustainable economy.*

**Keywords: Optimization, Village Funds, Economic Empowerment, Local Potential**

### **ABSTRAK.**

Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, namun implementasi yang optimal masih menghadapi tantangan dan disparitas di berbagai wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Dana Desa, faktor penentu keberhasilannya, serta merumuskan strategi optimalisasi untuk pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal di Desa Ranakolo Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan jenis deskriptif. Lokasi studi adalah Desa Ranakolo Selatan, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, NTT. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman: pemadatan data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Dana Desa di Ranakolo Selatan telah berlandaskan asas Transparansi (publikasi APBDes), Akuntabel (melalui MUSDES, RKP, LKPPD), Partisipatif (MUSDUS dan MUSRENBANGDES), serta Tertib dan Disiplin Anggaran. Upaya pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan prinsip. Kesetaraan (bantuan bibit, BUMDes), Partisipasi (pelatihan keterampilan), Keswadayaan, dan Keberlanjutan (pemanfaatan letak strategis). Faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan adalah Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Desa, dan

Teknologi/Literasi Digital. Strategi optimalisasi dilakukan melalui siklus perencanaan partisipatif yang ketat dan penguatan BPD dalam pengawasan. Optimalisasi pengelolaan Dana Desa di Desa Ranakolo Selatan didorong oleh sinergi antara tata kelola yang transparan dan akuntabel, dukungan partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan kapasitas aparatur desa dan literasi digital. Hal ini berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Optimalisasi, Dana Desa, Perdayaan Ekonomi, Potensi Lokal

## **PENDAHULUAN**

Urgensi kebijakan Dana Desa (DD) di Indonesia. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan untuk memperkuat wewenang desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejak disalurkan pada tahun 2015, Dana Desa telah menunjukkan dampak positif yang signifikan, seperti berperan dalam pengurangan angka kemiskinan dan mendorong peningkatan kemandirian desa. Bukti dari keberhasilan ini terlihat pada peralihan status desa dari 'Sangat Tertinggal' menuju 'Mandiri'. Namun, meskipun alokasi Dana Desa mencapai Rp 71 triliun pada tahun 2024 dan telah disalurkan sebesar Rp 610 triliun sejak 2015, desa berstatus Mandiri masih minoritas (hanya 23% dari total desa), dengan status Desa Berkembang masih mendominasi (32,8%). Fakta ini menunjukkan adanya disparitas signifikan dalam pertumbuhan ekonomi antar-desa. Disparitas dan belum maksimalnya status desa Mandiri ini mengindikasikan bahwa Dana Desa belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan desa, salah satunya karena lemahnya pengawasan dan masalah transparansi serta akuntabilitas.

Padahal, DD memiliki potensi besar untuk menjadi stimulus pembangunan. Tantangan utama saat ini adalah memastikan Dana Desa dikelola secara efektif dan efisien, dengan prioritas pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang secara khusus berbasis potensi lokal (PEL). Strategi PEL sangat penting karena setiap desa memiliki kekayaan sumber daya unik yang sering kali belum tergarap, dan jika dikelola dengan baik, dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang lebih sistematis dan kontekstual dalam pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini memfokuskan studi empiris pada Desa Ranakolo Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah wilayah yang memiliki potensi lokal namun belum diberdayakan secara maksimal. Terdapat kesenjangan (gap) antara mandat kebijakan Dana Desa yang menekankan asas pengelolaan transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan realitas implementasi di lapangan. Meskipun peraturan Dana Desa sudah ada, keberhasilan program sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti kapasitas tata kelola, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan potensi desa. Mengatasi kesenjangan ini, permasalahan yang akan dianalisis adalah: Bagaimana pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal pada Desa Ranakolo Selatan dilaksanakan? Apa faktor yang memengaruhi keberhasilannya?, dan yang paling krusial, Strategi apa saja yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa di desa tersebut?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan, dan merumuskan strategi optimalisasi Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal di Desa Ranakolo Selatan. Kontribusi studi ini menjadi sangat penting karena akan memberikan model strategi optimalisasi Dana Desa yang kontekstual dan aplikatif di tingkat tapak, khususnya di wilayah NTT yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang unik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ende dan panduan bagi Pemerintah Desa Ranakolo Selatan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan DD, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan

Kajian pustaka ini menempatkan penelitian pada persimpangan antara teori Tata Kelola Keuangan Desa (*Village Financial Governance*) dan konsep Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal (*Local Potential-Based Economic Em-powerment*). Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan implementasi dari *Decentralization and Local Governance* yang menuntut terpenuhinya prinsip-prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipatif. Ketiga asas ini, ditambah dengan asas Tertib Anggaran, membentuk kerangka kerja normatif yang memastikan Dana Desa dialokasikan secara efektif dan terhindar dari *moral hazard*. Konsistensi pelaksanaan asas-asas ini sangat menentukan optimalisasi Dana Desa. Optimalisasi sendiri dimaknai sebagai upaya pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, yang dalam konteks ini berarti memaksimalkan dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan Dana Desa tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi dari kualitas tata kelola (seperti yang diteliti oleh Setiawan et al., 2017 dan Ra'is & Rini, 2024) dan dampaknya terhadap perubahan sosial-ekonomi di tingkat tapak.

Dana Desa diarahkan untuk stimulasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), yang secara teoretis harus berlandaskan pada empat prinsip: Kesetaraan, Partisipasi, Keswadayaan, dan Keberlanjutan. Prinsip ini memastikan PEM menciptakan akses yang adil bagi kelompok rentan dan mendorong kemandirian (*self-reliance*), serta menjamin manfaat program bertahan lama. Secara kontekstual, PEM di desa harus didorong oleh Potensi Lokal (PEL), yaitu seluruh sumber daya unik desa (baik alam, manusia, maupun kelembagaan) yang dapat diubah menjadi keunggulan komparatif (seperti yang diulas Haridison et al., 2022). Dengan demikian, kerangka konseptual studi ini berargumen bahwa optimalisasi pengelolaan Dana Desa adalah fungsi dari integrasi tata kelola yang baik dengan strategi pemberdayaan yang secara eksplisit memanfaatkan dan mengembangkan PEL melalui peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital, yang pada akhirnya akan menjamin tercapainya *sustainable development* di Desa Ranakolo Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dan dirancang sebagai jenis penelitian deskriptif. Pendekatan fenomenologis dipilih untuk memahami fenomena sosial, yaitu optimalisasi pengelolaan Dana Desa (DD), dari perspektif partisipan di lapangan, berangkat dari asumsi bahwa realitas merupakan konstruksi sosial. Lokasi studi empiris ditetapkan di Desa Ranakolo Selatan, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan alasan desa ini memiliki potensi lokal yang belum diberdayakan secara maksimal dan telah memiliki program pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata, tindakan, dan dokumen. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, dengan fokus pada narasumber kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tokoh Karang Taruna, Tokoh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik utama: Observasi Partisipatif (*participatory observation*), Wawancara Mendalam (*indepth interview*), dan Dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan iteratif, mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan pemadatan data (reduksi), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data (*validity*) dan konsistensi (*reliability*), penelitian ini menggunakan teknik pengecekan Triangulasi Sumber. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber informan dengan hasil observasi dan dokumen resmi desa, guna memperkuat temu penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Temuan Lapangan Pengelolaan Dana Desa di Desa Ranakolo Selatan**

Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Ranakolo Selatan dianalisis berdasarkan empat asas utama dalam tata kelola keuangan desa. Asas Transparan diwujudkan melalui pemasangan Baliho APBDes dan pelaksanaan musyawarah perencanaan dan pertanggung-jawaban yang terbuka kepada masyarakat. Informasi ini tersedia dan dapat diakses, yang secara nyata meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Asas Akuntabel dipenuhi melalui proses berjenjang, dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penetapan APBDes, dilanjutkan dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPPD), dan bukti fisik pertanggungjawaban (SPJ). Mekanisme pengawasan dan evaluasi melibatkan BPD, APIP, dan Camat.

Asas Partisipatif terlihat jelas dari keterlibatan masyarakat sejak tahap awal, yaitu melalui Musyawarah Dusun (MUSDUS) dan Musdes, di mana lembaga perwakilan masyarakat (tokoh adat, agama, wanita, pemuda) diundang. Pemerintah desa secara eksplisit membuka ruang bagi masyarakat untuk mengkritik, mengusul, dan memberi saran. Terakhir, asas Tertib dan Disiplin Anggaran dijalankan dengan adanya kontrol berjenjang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD, serta pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa melalui penggunaan *Siskeudes* (Sistem Keuangan Desa). Implementasi keempat asas ini di Ranakolo Selatan menunjukkan praktik optimalisasi pengelolaan Dana Desa yang sejalan dengan kerangka teoritis tata kelola yang baik (*good governance*). Temuan ini mendukung pandangan Setiawan *et al.* (2017) yang menekankan bahwa akuntabilitas dapat terwujud melalui pengawasan internal dan eksternal, yang di Ranakolo Selatan diwujudkan oleh peran aktif BPD dan pihak *stakeholder*. Lebih lanjut, transparansi melalui baliho APBDes dan musyawarah yang terbuka menjadi faktor kunci dalam membangun *trust* masyarakat.

Namun, aspek teknis pengelolaan masih dapat ditingkatkan. Walaupun proses sudah tertib sesuai prosedur, temuan dari Nasir & Maulana (2021) tentang perlunya *Knowledge Management* dan *Management Agile* bagi anggota organisasi dapat dipertimbangkan. Optimalisasi Dana Desa di Ranakolo Selatan saat ini sangat bergantung pada kepatuhan prosedural, namun untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, perlu penekanan pada peningkatan kapasitas berkelanjutan aparatur desa, terutama Kaur Keuangan, dalam penerapan akuntansi keuangan desa yang konsisten dan sistematis, melampaui sekadar penggunaan *Siskeudes*.

## **Temuan Lapangan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal**

Program pemberdayaan ekonomi di Desa Ranakolo Selatan difokuskan pada pemanfaatan potensi lokal (sektor pertanian dan peternakan) dan dianalisis berdasarkan empat prinsip pemberdayaan. Prinsip Kesetaraan diterapkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, alat *alsinta* seperti traktor mini dan pompa air), bantuan bibit peternakan (ayam, babi), serta pembentukan dan penyertaan modal BUMDes. Program ini mencerminkan pengakuan bahwa semua pihak—termasuk kelompok rentan—memiliki hak setara untuk mengakses sumber daya produktif daerah. Prinsip Partisipasi diwujudkan melalui pelatihan peningkatan ekonomi keluarga (misalnya, pembuatan kue, abon, keripik), pengadaan bibit sayur-sayuran, rehabilitasi irigasi, dan pendirian BUMDes. Program ini dirancang bersama masyarakat untuk memastikan alokasi Dana Desa sesuai dengan kebutuhan *rill*. Prinsip Keswadayaan (Kemandirian) didorong melalui pelatihan keterampilan bagi PKK dan di bidang pertanian. Tujuan utamanya adalah membentuk kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri sendiri dan mengelola potensi lokal tanpa ketergantungan berlebihan pada bantuan luar. Terakhir, prinsip Keberlanjutan diupayakan melalui pemanfaatan letak desa yang strategis sebagai wilayah persimpangan untuk pengembangan wisata alam, wisata kuliner, dan penyedia sembako. Namun, diakui bahwa keberlanjutan menghadapi tantangan besar terkait masalah lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia dalam pertanian dan ketiadaan lahan pembuangan akhir sampah. Program pemberdayaan di Ranakolo Selatan telah mengarahkan Dana Desa sesuai dengan prioritas kebijakan terbaru dan secara spesifik terhubung dengan potensi lokal desa. Sebagian besar mata pencaharian warga adalah di sektor pertanian (96,2%), sehingga fokus bantuan pada alat *alsinta* dan bibit sangat relevan. Hal ini mendukung pandangan Scheyvens (1999) bahwa pemberdayaan ekonomi harus merujuk pada akses masyarakat lokal ke sumber daya produktif daerah. Melalui prinsip kesetaraan dan partisipasi, Dana Desa bertindak sebagai mekanisme distribusi peluang dan manfaat ekonomi, memungkinkan masyarakat—khususnya petani—memiliki kontrol lebih besar atas faktor produksi mereka. Namun, tantangan keberlanjutan yang terkait dengan pengelolaan limbah dan penggunaan bahan kimia perlu segera diatasi. Pemberdayaan ekonomi yang ideal harus mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar tujuan kemandirian dan kesejahteraan tercapai dalam jangka panjang (*sustainable*). BUMDes dan rencana koperasi desa menjadi instrumen kelembagaan vital untuk menjamin keberlanjutan program dan memfasilitasi pengembangan usaha berbasis komunitas, tetapi harus didukung dengan pelatihan manajemen usaha yang memadai.

## **Faktor Penentu Keberhasilan Dan Strategi Optimalisasi Faktor Keberhasilan**

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan Dana Desa di Desa Ranakolo Selatan bersifat multidimensi. Lima faktor utama yang teridentifikasi adalah:

1. **Transparansi:** Diwujudkan dalam informasi pengelolaan Dana Desa, laporan realisasi anggaran oleh APBDes, dan sisa anggaran, yang menumbuhkan *trust*.
2. **Akuntabilitas:** Terjamin melalui tahapan musyawarah (Musdes, RKP, APBDes) dan pengawasan ketat oleh BPD (LKPPD, SPJ).
3. **Partisipasi Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat dari perencanaan hingga monitoring program pemberdayaan ekonomi.

4. Kapasitas Aparatur Desa: Adanya pelatihan keterampilan bagi aparatur dalam perencanaan anggaran dan tata kelola keuangan.  
Teknologi dan Literasi Digital: Pemanfaatan teknologi (baliho APBDes, Sistem Informasi Desa/SID) untuk publikasi anggaran yang profesional dan transparan

## **Strategi Optimalisasi**

Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Ranakolo Selatan untuk mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa merupakan rangkaian proses yang terstruktur: MUSDUS→MUSREN-

BANGDES→RPJM→RKPDes→APBDes→Pelaksanaan & Pengawasan BPD Strategi ini dimulai dengan menggali gagasan di tingkat dusun (MUSDUS), menetapkan program prioritas (MUSRENBANGDES), merumuskan rencana jangka panjang dan tahunan (RPJM dan RKPDes), dan diakhiri dengan pelaksanaan alokasi Dana Desa dan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan, yang selalu berada dalam pengawasan BPD.

Rangkaian strategi ini pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan kebutuhan *bottom-up* masyarakat dengan kerangka regulasi Dana Desa *top-down*. Temuan menunjukkan bahwa faktor Teknologi dan Literasi Digital (ditunjukkan oleh publikasi baliho APBDes dan potensi *website* desa) secara langsung mendukung faktor Transparansi. Hal ini sejalan dengan penelitian Huda *et al.* (2020) yang menemukan bahwa pelayanan pemerintah desa berbasis TIK dapat meningkatkan akses kemudahan informasi publik. Implikasi strategi optimalisasi ini adalah pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan Kapasitas Aparatur Desa. Kapasitas yang memadai tidak hanya mencakup keterampilan teknis anggaran, tetapi juga pelatihan model pengembangan usaha berbasis komunitas dan literasi digital. Penguatan holistik ini menjadi jaminan untuk faktor Keberlanjutan program pemberdayaan. Dengan aparatur yang kompeten dan melek digital, desa dapat memastikan bahwa Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik jangka pendek (misalnya rabat jalan dan drainase), tetapi juga untuk investasi jangka panjang dalam pengembangan potensi sumber daya manusia lokal (generasi muda) yang merupakan kunci keberlanjutan masa depan desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian mengenai optimalisasi pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Ranakolo Selatan menghasilkan tiga temuan inti sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka tata kelola yang baik (*good governance*), di mana implementasinya secara konsisten berlandaskan pada empat asas utama: Transparan (melalui publikasi APBDes dan musyawarah terbuka), Akuntabel (melalui tahapan Musrenbangdes dan pertanggungjawaban BPD/LKPPD), Partisipatif (melalui MUSDUS dan Musdes), serta Tertib Anggaran (melalui kontrol berjenjang dan penggunaan *Siskeudes*).
2. Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dilakukan secara terstruktur, berfokus pada sektor pertanian/peternakan dan pengembangan kelembagaan BUMDes. Program ini dijalankan dengan mengintegrasikan empat prinsip pemberdayaan, yakni: Kesetaraan, Partisipasi, Keswadayaan, dan Keberlanjutan yang bertujuan untuk memberikan akses peluang dan manfaat ekonomi kepada masyarakat desa.

3. Faktor penentu keberhasilan utama dan strategi optimalisasi kunci adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa secara holistik, diikuti dengan peningkatan literasi digital masyarakat dan aparatur. Strategi ini krusial untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif yang berkelanjutan, menjamin transparansi/akuntabilitas, serta mendukung kemandirian BUMDes.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting, baik bagi praktik di tingkat desa maupun kebijakan di tingkat kabupaten:

1. Implikasi Praktis (Pemerintah Desa/Masyarakat): Pemerintah Desa Ranakolo Selatan dan Lembaga Desa (BPD, BUMDes, Karang Taruna) perlu memprioritaskan peningkatan kualitas SDM dan literasi digital secara berkelanjutan. Hal ini meliputi pelatihan manajemen BUMDes yang profesional dan pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi dan pemasaran potensi wisata/kuliner. Upaya ini akan menjamin BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang *sustainable*.
2. Implikasi Kebijakan (Pemerintah Kabupaten Ende): Pemerintah Kabupaten disarankan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aspek keberlanjutan lingkungan dari program-program Dana Desa, khususnya di wilayah pertanian. Pemerintah Kabupaten juga perlu mengalokasikan dana dan pendampingan yang berfokus pada penanganan masalah ekologis, seperti mengatasi penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan menyediakan solusi pengelolaan limbah terpusat, demi menjaga kualitas potensi lokal desa dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, L. (2024, November 7). *Optimaslisasi Dana Desa Belum Maksimal, Meski Penyalurannya Capai Rp 610 Triliun*. Kontan.Co.Id.
- Ashar, A., & Agustang, A. (2020). Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. *Jurnal Sosialisasi*, 7(2), 19–25.
- Boonperm, J., Haughton, J., & Khandker, S. R. (2013). Does the Village Fund matter in Thailand? Evaluating the impact on incomes and spending. *Journal of Asian Economics*, 25, 3–16. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2013.01.001>.
- BPS. (2024). *Jumlah Penduduk Perdesa Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Ende, Hasil Sensus Penduduk 2020*. Ntt.Bps.Go.Id. <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAzOSMx/jumlah-penduduk-perdesa-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-ende--hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- Cobuild, C. (2015). *Advanced Dictionary of English*. PT. Gramedia Printing.
- Gianie. (2023, July 27). *Dana Desa dan Peningkatan Desa Mandiri*. Kompas.Id.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek*. Bumi Aksara.
- Haridison, A., Iskandar, D., & Gaffar, U. H. (2022). Model Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Sampirang I (Satu) Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100–159. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>.

Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang).

*Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan,*

6(3)<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3406>.

Kementerian Desa & PDT Republik Indonesia. (2024). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta.

<https://idm.kemendesa.go.id>.

Mahardhani, A. J. (2023). *Pemerintahan Desa*. Ruang Karya Bersama.

Nasir, I., & Maulana, A. (2021). Model Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Meranti.

*Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

*Kabupaten Indragiri Hilir*, 7(2), 89–94.

<https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v7i2.205>.

Nasir, M., Ghazali, M. B., & Yanti, F. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Melalui Pengembangan Masyarakat Islam di Kabupaten Pringsewu Lampung.

*Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2), 191–212.

<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.11331>.

Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Sriartha, I. P. (2023). *Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Press.

Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2024). Transparency and Accountability in Village Fund Management: An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024. *Journal of Administration and Development*, 1(2).

Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015.

*Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1.

<https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483>.

Suryawan, I. B., & Mahagangga, I. B. O. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Desa Wisata*. Penerbit Adab.

Wahyuni, S. (2019). *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Selemba Empat.